

Dampak Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja Terhadap Human Security di Wilayah Provinsi Sisaket-Oddar Mancheay pada Periode Mei-Desember 2025

Muhammad Azizul Hakim¹, Muhammad Indrawan Jatmika², Adinda Khairunnisa³,
Aryofa Nur Umami⁴, Karen Kalisha Anwar⁵

¹Prodi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
E-mail: Adinda6027@gmail.com¹

Article History:

Received: 05 September 2026

Revised: 16 September 2026

Accepted: 21 September 2026

Keywords: Human Security, Konflik Perbatasan, Thailand-Kamboja, Sisaket, Oddar Mancheay.

Abstract: Eskalasi bentrokan militer dalam konflik perbatasan Thailand-Kamboja pada periode Mei-Desember 2025 memicu krisis kemanusiaan yang signifikan di wilayah perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari konflik bersenjata tersebut terhadap human security masyarakat sipil yang tinggal di Provinsi Sisaket (Thailand) dan Oddar Mancheay (Kamboja). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai dokumen resmi, laporan organisasi internasional, serta artikel ilmiah terkait. Analisis data dioperasikan melalui kerangka konsep human security yang mencakup dimensi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini memperburuk keamanan manusia secara multidimensional. Ketegangan militer menyebabkan hilangnya pendapatan lokal, penurunan remittance, kelangkaan dan inflasi pangan, penutupan belasan fasilitas kesehatan serta ratusan sekolah, keterbatasan akses air bersih di pengungsian, hingga jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa batas wilayah tidak hanya mengancam kedaulatan negara, tetapi secara langsung merusak fondasi keselamatan individu dari rasa takut (*freedom from fear*) dan kekurangan (*freedom from want*). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan sosial pascakonflik yang komprehensif bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

PENDAHULUAN

Konflik perbatasan merupakan salah satu persoalan yang masih banyak terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar negara anggota ASEAN memiliki pengalaman sejarah sebagai wilayah jajahan, sehingga batas-batas negara yang ditetapkan pada masa kolonial sering kali menimbulkan sengketa setelah masing-masing negara memperoleh kemerdekaan. Ketidakjelasan delimitasi wilayah tersebut menjadi salah satu faktor utama munculnya konflik perbatasan antarnegara, termasuk sengketa antara Thailand dan Kamboja di kawasan Candi Preah Vihear (Sky

News, 2025).

Sengketa Thailand–Kamboja berakar pada perbedaan interpretasi terhadap penetapan batas wilayah berdasarkan Perjanjian Prancis–Siam tahun 1904–1907. Kamboja menggunakan Peta Annex I Tahun 1907 sebagai dasar klaim wilayah, sedangkan Thailand menolak keabsahan peta tersebut dan menggunakan interpretasi batas wilayah yang berbeda (Nuraulia, 2008). Perselisihan tersebut semakin kompleks setelah Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) pada tahun 1962 memutuskan bahwa Candi Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja. Meskipun demikian, putusan tersebut tidak menyelesaikan persoalan delimitasi wilayah di sekitar candi sehingga bentrokan bersenjata masih berulang hingga beberapa dekade berikutnya (Pou, 2013).

Konflik kembali mengalami eskalasi pada tahun 2025 setelah serangkaian insiden di wilayah perbatasan yang melibatkan personel militer kedua negara. Bentrokan yang terjadi sejak Mei hingga Desember 2025 tidak hanya berlangsung di sekitar Candi Preah Vihear, tetapi juga meluas ke wilayah strategis lainnya seperti Ta Moan, Ta Krabei, O Smach, dan Emerald Triangle. Konflik tersebut menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, pengungsian masyarakat sipil, serta meningkatnya ketegangan diplomatik antara kedua negara (Sopheang Cheang, 2026; Syarifudin, 2025).

Dampak konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan negara, tetapi juga menyentuh dimensi human security atau keamanan manusia. Konflik bersenjata mengancam keselamatan masyarakat sipil, mengganggu akses terhadap kebutuhan dasar, memicu pengungsian, serta meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Menurut konsep human security yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), keamanan manusia tidak hanya diartikan sebagai perlindungan negara dari ancaman eksternal, tetapi juga sebagai perlindungan individu dari rasa takut (freedom from fear) dan dari kekurangan (freedom from want). Oleh karena itu, konflik Thailand–Kamboja tahun 2025 menjadi kasus yang penting untuk dikaji dari perspektif keamanan manusia.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas konflik Thailand–Kamboja dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian oleh Devy dan Sholikhah (2025) menganalisis penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik perbatasan Thailand–Kamboja tahun 2025 dengan menitikberatkan pada perlindungan penduduk sipil dan pembatasan penggunaan kekuatan. Penelitian tersebut menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional oleh kedua negara, termasuk penggunaan kekuatan yang tidak proporsional serta dampaknya terhadap masyarakat sipil.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hafizh dan Wismayana (2025) mengkaji kompleksitas konflik Thailand–Kamboja serta peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tidak hanya dipengaruhi oleh sengketa wilayah, tetapi juga oleh faktor sejarah kolonial, nasionalisme, serta dinamika politik domestik kedua negara. ASEAN berperan sebagai mediator melalui pendekatan ASEAN Way guna mencegah eskalasi konflik menjadi ancaman keamanan regional.

Sementara itu, penelitian Touch (2021) menyoroti konflik Thailand–Kamboja pasca penetapan Candi Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2008. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan bottom-up peacebuilding dengan menekankan pentingnya peran masyarakat lokal dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat lokal memiliki keterbatasan dalam memengaruhi kebijakan pemerintah, keterlibatan mereka tetap menjadi faktor penting dalam proses resolusi konflik jangka panjang.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap kajian konflik

.....

Thailand–Kamboja, sebagian besar masih berfokus pada aspek hukum internasional, diplomasi regional, dan resolusi konflik. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji dampak konflik Thailand–Kamboja tahun 2025 terhadap human security, terutama pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Provinsi Sisaket (Thailand) dan Oddar Meanchey (Kamboja) selama periode Mei hingga Desember 2025. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konflik perbatasan Thailand–Kamboja terhadap human security masyarakat di Provinsi Sisaket dan Oddar Meanchey pada periode Mei–Desember 2025. Penelitian ini menggunakan konsep human security melalui pendekatan freedom from fear dan freedom from want untuk menjelaskan bagaimana konflik memengaruhi keamanan, kesejahteraan, serta kehidupan masyarakat sipil di wilayah perbatasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya mengenai keamanan manusia dalam konflik perbatasan di kawasan Asia Tenggara.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan konsep Keamanan Manusia (Human Security) sebagai landasan dalam menganalisis dampak konflik perbatasan Thailand–Kamboja terhadap masyarakat di Provinsi Sisaket dan Oddar Meanchey. Barry Buzan (1991) menjelaskan bahwa keamanan tidak hanya berorientasi pada perlindungan negara dari ancaman militer (state-centric security), tetapi juga mencakup perlindungan individu dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup dan kesejahteraannya. Melalui pendekatan sektoral, Buzan memandang bahwa ancaman terhadap keamanan dapat berasal dari berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, lingkungan, dan militer, sehingga keamanan manusia menjadi bagian penting dalam memahami dampak suatu konflik.

Dalam penelitian ini, konsep human security dioperasionalkan menggunakan kerangka yang dikembangkan oleh Werthes, Heaven, dan Vollnhals (2011), yang membagi keamanan manusia ke dalam tujuh dimensi, yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Ketujuh dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi dampak konflik perbatasan Thailand–Kamboja terhadap kondisi masyarakat di wilayah perbatasan selama periode Mei–Desember 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2005), penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menemukan fakta dan memberikan interpretasi yang tepat terhadap suatu fenomena. Sementara itu, Kim, Sefcik, dan Bradway (2016) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena melalui analisis terhadap peristiwa yang terjadi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis dampak konflik perbatasan Thailand–Kamboja terhadap human security masyarakat di Provinsi Sisaket (Thailand) dan Oddar Meanchey (Kamboja) pada periode Mei–Desember 2025, yang merupakan fase eskalasi konflik hingga tercapainya gencatan senjata.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Menurut Moleong (2009), data sekunder merupakan data pendukung penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, laporan, artikel ilmiah, serta publikasi resmi. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini dikumpulkan dari buku,

.....

jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen resmi pemerintah Thailand dan Kamboja, publikasi ASEAN dan Mahkamah Internasional (ICJ), serta portal berita yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh untuk menemukan pola hubungan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan (Nasution, 2023). Data dianalisis menggunakan konsep human security yang dikembangkan oleh Barry Buzan serta indikator keamanan manusia menurut Werthes, Heaven, dan Vollnhals (2011) untuk menjelaskan dampak konflik perbatasan Thailand–Kamboja terhadap keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik masyarakat di wilayah perbatasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan Ekonomi

Konflik perbatasan Thailand–Kamboja periode Mei–Desember 2025 memberikan dampak langsung terhadap keamanan ekonomi masyarakat di wilayah Sisaket dan Oddar Meanchey. Penutupan jalur perbatasan menyebabkan terganggunya perdagangan, aktivitas pertanian, mobilitas tenaga kerja, serta sektor pariwisata yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Meskipun secara nasional dampaknya tidak terlalu besar terhadap perekonomian kedua negara, masyarakat di wilayah perbatasan mengalami penurunan pendapatan dan meningkatnya kerentanan ekonomi.

Berdasarkan konsep keamanan ekonomi yang dikembangkan oleh Werthes, Heaven, dan Vollnhals (2011), kondisi tersebut menunjukkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh sumber penghidupan yang layak. Data International Monetary Fund menunjukkan bahwa meskipun GDP per capita Kamboja meningkat menjadi USD 8.403 pada tahun 2025, konflik menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di wilayah terdampak, sedangkan Thailand mengalami kontraksi ekonomi lokal di Provinsi Sisaket (International Monetary Fund, 2026). Selain itu, lebih dari 900.000 pekerja migran Kamboja kembali dari Thailand sehingga remittance turun dari sekitar 6% menjadi 4% terhadap GDP dengan kerugian mencapai USD 665 juta (Niem Chheng, 2026). Kondisi tersebut memperlihatkan hilangnya salah satu sumber pendapatan utama rumah tangga yang memperburuk keamanan ekonomi masyarakat (Werthes, Heaven, & Vollnhals, 2011).

Gangguan perdagangan lintas batas turut memperbesar dampak ekonomi. ASEAN Macroeconomic Research Office mencatat ekspor Kamboja ke Thailand turun sebesar 13,5%, sementara sektor pertanian dan konstruksi di Thailand juga mengalami kekurangan tenaga kerja migran (ASEAN Macroeconomic Research Office, 2025). Di sisi lain, Asian Development Bank melaporkan penurunan kunjungan wisatawan internasional sebesar 16,9% yang menyebabkan kerugian sekitar USD 855 juta pada sektor pariwisata (Asian Development Banks, 2026). Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya sistem perlindungan sosial (BTI Social Nets) sehingga banyak keluarga kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Nations, 2026).

Konflik juga menyebabkan kerusakan sektor pertanian. World Food Programme melaporkan sekitar 42% hasil panen di Oddar Meanchey dan Preah Vihear mengalami kerugian, sementara inflasi di Kamboja meningkat menjadi 2,5% akibat kenaikan harga pangan (World Food Programme, 2025; Asian Development Banks, 2026). Dengan demikian, konflik Thailand–Kamboja menunjukkan bahwa keamanan ekonomi masyarakat perbatasan mengalami penurunan melalui hilangnya pendapatan, terganggunya perdagangan, lemahnya perlindungan sosial, dan meningkatnya biaya hidup sebagaimana dijelaskan dalam konsep keamanan ekonomi Werthes, Heaven, dan Vollnhals (2011).

Keamanan Pangan

Konflik Thailand–Kamboja juga berdampak langsung terhadap keamanan pangan masyarakat di wilayah perbatasan. Bentrokan bersenjata mengganggu aktivitas pertanian, distribusi logistik, serta akses masyarakat terhadap bahan pangan. Dalam konsep Werthes, Heaven, dan Vollnhals (2011), kondisi tersebut mencerminkan menurunnya keamanan pangan karena masyarakat tidak lagi memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan pangan secara berkelanjutan.

Asian Development Bank mencatat bahwa pertumbuhan sektor pertanian Kamboja hanya mencapai 0,9% pada tahun 2025, sedangkan World Food Programme melaporkan lebih dari 120.000 penduduk mengalami keterbatasan akses pangan akibat terganggunya distribusi selama konflik (Asian Development Banks, 2026; World Food Programme, 2025). Selain itu, inflasi pangan meningkat hingga 4,2% sehingga harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal dan semakin menurunkan daya beli masyarakat (Asian Development Banks, 2026).

Kerentanan pangan di Kamboja sebenarnya telah terjadi sebelum konflik. FAO mencatat sekitar 24% penduduk Kamboja mengalami kekurangan gizi, jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand yang berada pada kisaran 10% (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2024). Kondisi tersebut diperkuat oleh data UNICEF yang menunjukkan sekitar 22% anak di bawah lima tahun di Kamboja mengalami *underweight*, sedangkan Thailand hanya sekitar 7% (United Nations Children's Fund (UNICEF), 2024). Konflik semakin memperburuk kondisi tersebut karena keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dan layanan dasar.

Selain menurunkan produksi pangan, konflik juga menyebabkan kenaikan harga beras hingga 18% di Oddar Meanchey dan diperkirakan menurunkan produktivitas lahan pertanian akibat keberadaan ranjau darat (World Food Programme, 2025; ASEAN Macroeconomic Research Office, 2025). Hambatan distribusi bantuan pangan yang dilaporkan Humanitarian Response Forum turut memperbesar kerentanan masyarakat di wilayah konflik (Humanitarian Response Forum, 2026).

Secara keseluruhan, konflik Thailand–Kamboja menyebabkan keamanan pangan masyarakat di wilayah Sisaket dan Oddar Meanchey mengalami penurunan melalui terganggunya produksi, distribusi, dan akses terhadap pangan, serta meningkatnya angka kerentanan gizi. Temuan ini memperkuat konsep keamanan pangan Werthes, Heaven, dan Vollnhals (2011) bahwa konflik bersenjata tidak hanya mengancam keselamatan fisik, tetapi juga menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Keamanan Kesehatan

Bentrokan bersenjata menyebabkan terganggunya layanan kesehatan, meningkatnya jumlah pengungsi, serta bertambahnya risiko penyebaran penyakit menular. Menurut UNICEF Cambodia, lebih dari 134.700 orang mengungsi, termasuk sekitar 158.000 anak, sementara 13 fasilitas kesehatan di wilayah Preah Vihear dan Oddar Meanchey terpaksa ditutup sehingga pelayanan kesehatan dasar dan imunisasi tidak dapat berjalan secara optimal (UNICEF Cambodia, 2025).

Dalam perspektif Werthes, Heaven, dan Vollnhals (2011), kondisi tersebut menunjukkan menurunnya keamanan kesehatan melalui meningkatnya risiko *child mortality rate* dan bertambahnya populasi yang rentan terhadap penyakit. World Health Organization melaporkan sedikitnya 18 korban jiwa dari kalangan sipil, termasuk seorang bayi, serta meningkatnya ancaman penyakit akibat padatnya kamp pengungsian dan terbatasnya akses air bersih (World Health Organization, 2025). Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya fasilitas sanitasi. World Vision International mencatat bahwa ribuan pengungsi hanya dilayani oleh 37 toilet dan 19 tangki air

sehingga meningkatkan risiko penyebaran diare dan infeksi saluran pernapasan (World Vision International, 2025).

Selain dampak fisik, konflik juga menimbulkan gangguan psikososial, terutama bagi anak-anak yang mengalami trauma akibat kekerasan dan pengungsian (UNICEF Cambodia, 2025). Di sisi lain, penurunan aktivitas ekonomi dan meningkatnya inflasi mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi sehingga memperbesar risiko malnutrisi (Asian Development Banks, 2026). Meskipun WHO dan UNICEF telah memberikan bantuan berupa vaksinasi darurat, layanan kesehatan, serta air bersih, kebutuhan pendanaan masih belum mencukupi untuk mengatasi seluruh dampak kesehatan akibat konflik (UNICEF Cambodia, 2025). Dengan demikian, konflik telah memperburuk keamanan kesehatan masyarakat melalui meningkatnya kerentanan terhadap penyakit, terganggunya pelayanan kesehatan, dan memburuknya kondisi hidup pengungsi.

Keamanan Lingkungan

Konflik Thailand–Kamboja juga memberikan dampak terhadap keamanan lingkungan, khususnya pada akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Perpindahan penduduk secara besar-besaran akibat konflik menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap fasilitas dasar di kamp pengungsian. UNICEF Cambodia melaporkan bahwa lebih dari 134.700 pengungsi tinggal di lokasi darurat dengan fasilitas sanitasi yang sangat terbatas sehingga meningkatkan jumlah masyarakat yang terdampak keterbatasan akses air bersih dan sanitasi (UNICEF Cambodia, 2025).

Data World Vision International menunjukkan bahwa sekitar 124.940 pengungsi tersebar di 134 lokasi pengungsian dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang belum memadai (World Vision International, 2025). Sementara itu, Oxfam telah membangun fasilitas sanitasi darurat dan sistem penyaringan air untuk lebih dari 25.000 pengungsi, namun kapasitas tersebut masih jauh dari kebutuhan yang ada (OXFAM, 2025). Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan infeksi saluran pencernaan.

Menurut konsep Werthes, Heaven, dan Vollnhals (2011), keterbatasan akses terhadap lingkungan yang sehat merupakan bentuk ketidakamanan lingkungan karena menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. World Health Organization juga menegaskan bahwa hampir 490.000 orang terdampak konflik menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak (World Health Organization, 2025). Meskipun bantuan internasional terus diberikan, UNICEF Cambodia menyebutkan bahwa masih dibutuhkan tambahan pendanaan untuk memperkuat program penyediaan air bersih dan sanitasi di wilayah konflik (UNICEF Cambodia, 2025). Dengan demikian, konflik tidak hanya merusak infrastruktur lingkungan, tetapi juga memperbesar risiko kesehatan masyarakat akibat terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.

Keamanan Personal dan Komunitas

UNICEF Cambodia melaporkan sedikitnya 18 warga sipil di Kamboja dan satu warga sipil di Thailand meninggal dunia akibat konflik, sementara ratusan ribu penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari perlindungan (UNICEF Cambodia, 2025). Dalam perspektif Werthes, Heaven, dan Vollnhals (2011), kondisi tersebut menunjukkan menurunnya keamanan personal karena individu kehilangan perlindungan atas keselamatan fisik dan hak dasar untuk hidup secara aman.

Selain mengancam individu, konflik juga berdampak terhadap keamanan komunitas. World Health Organization mencatat bahwa sekitar 490.000 orang terdampak konflik, termasuk perempuan dan anak-anak yang harus mengungsi dari wilayah perbatasan (World Health

Organization, 2025). Pengungsian dalam jumlah besar menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses terhadap pendidikan dan pelayanan publik. Penutupan sekitar 600 sekolah yang berdampak pada lebih dari 150.000 siswa semakin memperlemah kohesi sosial dan menghambat keberlangsungan kehidupan komunitas (UNICEF Cambodia, 2025). Di samping itu, meningkatnya jumlah pengungsi yang bergantung pada bantuan internasional menunjukkan melemahnya kapasitas masyarakat untuk mempertahankan kehidupan secara mandiri (Nations, 2026). Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya merusak aspek fisik, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan keberlangsungan komunitas di wilayah terdampak.

Konflik tersebut juga berimplikasi terhadap keamanan politik. Serangan terhadap kawasan permukiman sipil, fasilitas publik, serta terbatasnya perlindungan terhadap masyarakat menunjukkan adanya ancaman terhadap hak-hak sipil selama konflik berlangsung. Thomas Newdick (2025) melaporkan bahwa serangan udara di wilayah perbatasan menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas umum yang seharusnya memperoleh perlindungan dalam hukum humaniter internasional (Thomas Newdick, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya menciptakan ancaman militer, tetapi juga mengurangi kemampuan negara dalam menjamin keamanan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam kerangka Werthes, Heaven, dan Vollnhals (2011), kondisi tersebut mencerminkan menurunnya keamanan politik karena masyarakat mengalami keterbatasan perlindungan terhadap hak sipil dan rasa aman selama konflik berlangsung.

Secara keseluruhan, konflik Thailand–Kamboja periode Mei–Desember 2025 menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga memengaruhi berbagai dimensi human security. Keamanan ekonomi mengalami penurunan akibat terganggunya aktivitas perdagangan, pertanian, dan mata pencaharian masyarakat. Keamanan pangan terdampak melalui terganggunya produksi dan distribusi pangan serta meningkatnya kerawanan gizi. Keamanan kesehatan memburuk karena terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan meningkatnya risiko penyakit di kamp pengungsian, sedangkan keamanan lingkungan mengalami penurunan akibat keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Selain itu, konflik juga memperburuk keamanan personal, komunitas, dan politik melalui meningkatnya korban sipil, pengungsian massal, terganggunya kehidupan sosial, serta melemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Temuan ini memperkuat konsep human security yang dikembangkan oleh Werthes, Heaven, dan Vollnhals (2011) bahwa konflik bersenjata tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap keamanan dan kesejahteraan manusia dalam berbagai dimensi kehidupan

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja di wilayah Provinsi Sisaket dan Oddar Meanchey pada periode Mei–Desember 2025 memberikan dampak yang signifikan dan destruktif terhadap seluruh dimensi *human security* masyarakat di wilayah perbatasan. Secara refleksi teoritis, temuan ini memperkuat argumen Barry Buzzan serta kerangka analisis Werthes, Heaven, dan Vollnhals yang menyatakan bahwa ancaman keamanan pasca perang dingin tidak lagi bersifat *state-centric* semata, melainkan berdampak langsung pada individu dan komunitas. Konflik bersenjata terbukti secara nyata menurunkan kualitas hidup masyarakat perbatasan secara multidimensional, yang diidentifikasi melalui tujuh indikator utama yaitu penurunan drastis keamanan ekonomi akibat lumpuhnya perdagangan dan hilangnya pendapatan pekerja migran, ancaman keamanan pangan lewat inflasi kebutuhan pokok dan kerusakan lahan, penurunan keamanan kesehatan dan lingkungan yang ditandai oleh penutupan fasilitas medis serta krisis air bersih di kamp pengungsian, hingga runtuhnya keamanan personal,

.....

komunitas, dan politik akibat jatuhnya korban jiwa sipil, penutupan ratusan sekolah, dan rusaknya infrastruktur publik. Konflik ini membuktikan bahwa sengketa kedaulatan negara mengorbankan dua hak paling mendasar manusia, yaitu hak untuk bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) dan bebas dari kekurangan (*freedom from want*).

DAFTAR REFERENSI

- ASEAN Macroeconomic Research Office. (2025). *Assessment of the Impact of Cambodia-Thailand Border conflicts on cambodia economy*. ASEAN MACROECONOMIC RESEARCH OFFICE.
- Asian Development Banks. (2026). *The Asian Development Outlook (ADO) April 2026* . Asian Development Banks.
- Buzan, B. (1991). New patterns of global security in the twenty-first century, International Affairs, Volume 67, Issue 3. *International Affairs*, 431-451.
- Devy, O. A., & Sholikhah, D. I. (2025). Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja 2025 (Perlindungan Sipil dan Batasan Penggunaan Kekukatan). *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*.
- Food and Agriculture organization of the united Nations (FAO). (2024). *KINGDOM OF CAMBODIA FAO COUNTRY PROGRAMMING FRAMEWORK 2024-2028*. Food and Agriculture organization of the united Nations.
- Hafizh, S. B., & Wiswayana, W. M. (2025). Kompleksitas Konflik Thailand-Kamboja atas Kuil Preah Vihear: Peran ASEAN dalam Stabilitas Kawasan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Humanitarian Response Forum. (2026). *Situation Report 13: Cambodia-Thailand Border Situation, Cambodia Humanitarian Response Forum - 2 January 2026*. Humanitarian Response Forum.
- International Monetary Fund. (2026). *World Economic Outlook, Global Economy in the Shadow of War*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Kaldor, M., Matrin, M., & Selchow, S. (2007). Human Security: A New Strategic Narrative for Europe. In M. Kaldor, M. Matrin, & S. Selchow, *Human Security: A New Strategic Narrative for Europe*, vol. 83, no. 2, *europe at 50* (pp. 273-288). Oxford: Oxford University Press on behalf of the Royal Institute of International Affairs.
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2016). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Research in Nursing & Health. Health Journal*, 23-42.
- Lautensach, A. K. (2020). *Human security in world affairs: Problems and opportunities (2nd ed.)*. Vancouver: University of Northern British Columbia & BCcampus Press.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Nations, U. (2026). Socio-economic Impact Assessment of Cambodia–Thailand Border Conflict. *Publications*, 13-121.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghaila Indonesia.
- Niem Chheng. (2026, April 14). *UN warns displacement could trigger economic crash in Thailand-Cambodia border communities*. Retrieved from Asia News Network: <https://asianews.network/un-warns-displacement-remittance-losses-could-trigger-economic-crash-in-thai-cambodia-border-communities/>
- Nuraulia, Z. R. (2008). URGENSI KEDUDUKAN KUIL PREAH VIHEAR DALAM KONFLIK THAILAND DAN KAMBOJA TAHUN 2008. *Jurnal Sejarah*, 3-5.
- OXFAM. (2025, August 9). *Oxfam Reaffirms Support to Displaced Communities Following Thailand-Cambodia Ceasefire Agreement*. Retrieved from OXFAM Website:

- <https://cambodia.oxfam.org/latest/stories/oxfam-reaffirms-support-displaced-communities-following-thailand-cambodia-ceasefire>
- Permana, R. H. (2025, Juli 25). *Ini Wilayah Perbatasan yang Jadi Titik Ketegangan Thailand vs Kamboja*. Retrieved from detiknews.com: <https://news.detik.com/internasional/d-8028524/ini-wilayah-perbatasan-yang-jadi-titik-ketegangan-thailand-vs-kamboja>
- Pou, S. (2013). CAMBODIA'S BORDER CONFLICT WITH THAILAND. *Southeast Asian Affair*, 87-100.
- Rizky L Pratama . (2025, Juli 26). *Konflik Thailand-Kamboja Memasuki Hari Ketiga, 33 Orang Tewas dan 168.000 Warga Mengungsi*. Retrieved from Kompas.TV/International: <https://www.kompas.tv/internasional/607652/konflik-thailand-kamboja-memasuki-hari-ketiga-33-orang-tewas-dan-168-000-warga-mengungsi>
- Sky News. (2025, Juli 28). *What you need to know about the cross-border violence in Thailand and Cambodia as ceasefire agreed*. Retrieved from SkyNews.com: <https://news.sky.com/story/why-have-tensions-escalated-between-thailand-and-cambodia-and-is-it-safe-to-travel-there-13400990>
- Sopheang Cheang. (2026, March 26). *apnews*. Retrieved from apnews Web Site: <https://apnews.com/article/cambodia-border-fighting-preah-vihear-temple-78ed49b616c43df61ad9194b8db22621>
- Syarifudin. (2025, Desember 11). *Perang Thailand dan Kamboja Memasuki Hari Keempat, Korban Terus Bertambah*. Retrieved from Sindonews Web site: <https://international.sindonews.com/read/1654545/40/perang-thailand-dan-kamboja-memasuki-hari-keempat-korban-terus-bertambah-1765447933>
- Tempo.co. (2025, Juni 09). *Konflik Thailand-Kamboja: Kronologi, Latar Belakang dan Solusi*. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/internasional/konflik-thailand-kamboja-kronologi-latar-belakang-dan-solusi-1673706>
- Tempo.co. (2025, Juli 26). *Kronologi Konflik antara Thailand dengan Kamboja Sepanjang 2025*. Retrieved from Tempo.co Web site: <https://www.tempo.co/internasional/kronologi-konflik-antara-thailand-dengan-kamboja-sepanjang-2025-2051279>
- Teng Yalirozy. (2025, August 9). *Oxfam Installs Mobile Toilets, Calls for Urgent Aid in Cambodia's Displacement Camps*. Retrieved from Cambodianess: <https://cambodianess.com/article/oxfam-installs-mobile-toilets-calls-for-urgent-aid-in-cambodias-displacement-camps>
- Thomas Newdick. (2025, July 24). *Thai F-16 Strikes As Border Dispute With Cambodia Erupts*. Retrieved from TWZ Web site: <https://www.twz.com/news-features/thai-f-16-strikes-as-border-dispute-with-cambodia-erupts>
- Touch, K. (2021). Cambodian-Thai Border Conflict: A Critical Case Study and Grassroots Stakeholders' Perspectives on the 2008 Preah Vihear Temple. *Sociial Science*.
- UNICEF Cambodia. (2025). *Country Office Humanitarian Situation Report No.1*. PNOMH PENH: UNICEF Cambodia.
- UNICEF Cambodia. (2025, July 31). *UNICEF Cambodia Press Release: UNICEF Scales Up Humanitarian Response for Children and Families Displaced by Border Conflict*. Retrieved from UNICEF Cambodia: <https://www.unicef.org/cambodia/press-releases/unicef-scales-humanitarian-response-children-and-families-displaced-border-conflict>
- UNICEF Cambodia. (2025). *UNICEF Cambodia Situation Report*. PHNOM PENH: UNICEF Cambodia.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2024). *Child Food Poverty. Nutrition Deprivation in Early Childhood. Data Tables. Child Nutrition Report, 2024*. New York: UNICEF.

- United Nations Human Rights. (1949, August 12). *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Retrieved from United Nations Human Rights Web site: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war>
- Werthes, S., Heaven, C., & Vollnhals, S. (2011). Assessing Human Insecurity Worldwide: The Way to A Human (In)Security Index . *INEF Report*.
- World Food Programme (WFP). (2026). *World Food Programme Country Brief Cambodia February 2026*. World Food Programme .
- World Food Programme. (2025). *MARKET SITUATION UPDATE, Amid Cambodia-Thailand Border Conflict*. World Food Programme.
- World Health Organization. (2025). *Public Health Situation Analysis (PHSA)*. Jenewa: World Health Oragnization (WHO).
- World Vision International . (2025). *Situation Report 17: Displacement Crisis as a Result of the Cambodia-Thailand Border Conflict*. PHNOM PENH: World Vision International .
- World Vision International. (2025). *Situation Report 14: Displacement Caused by Cambodia-Thailand*. PNOMH PENH: World Vision International.
- Yashraj Sharma . (2025, October 27). *ALJAZEERA*. Retrieved from What's in the Thai-Cambodia peace agreement and can it hold?: <https://www.aljazeera.com/news/2025/10/27/whats-in-the-thai-cambodia-peace-agreement-and-can-it-hold>
-